

ANALISIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PAI

Nur Halizah Palem¹, Fery Darmawan², Muhammad Nawawi³, Siti Halimah⁴

halizah0331244035@uinsu.ac.id¹, fery0331244034@uinsu.ac.id²,

muhammad0331244033@uinsu.ac.id³, sitihalimah@uinsu.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur akademik dan kebijakan pendidikan terbaru. Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons atas kebutuhan pendidikan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Pembelajaran PAI dalam kerangka kurikulum ini mengedepankan pendekatan yang holistik, diferensiatif, serta proyek berbasis nilai-nilai keislaman yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun kurikulum ini membawa semangat baru, masih terdapat tantangan dalam hal kesiapan guru, sarana pendukung, serta pemahaman konsep diferensiasi di lingkungan satuan pendidikan.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Pendidikan Agama Islam, Implementasi, Profil Pelajar Pancasila.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Kurikulum Merdeka (Independent Curriculum) in Islamic Religious Education (PAI) through a literature review of various academic sources and recent educational policies. The Kurikulum Merdeka emerged as a response to the need for a more flexible, contextual, and character-oriented education aligned with the Profil Pelajar Pancasila (Pancasila Student Profile). PAI learning within this curriculum framework emphasizes a holistic, differentiated approach and project-based learning grounded in Islamic values that are applicable in daily life. The literature review indicates that although the curriculum introduces a fresh spirit to education, challenges remain in terms of teacher preparedness, supporting infrastructure, and conceptual understanding of differentiation in educational institutions.

Keywords: Kurikulum Merdeka, Islamic Religious Education, Implementation, Pancasila Student Profile.,

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik. Seiring perkembangan zaman, pendekatan dan strategi pembelajaran PAI perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Kurikulum Merdeka, yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, merupakan inovasi kurikulum terbaru yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menyusun pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik siswa (Kemendikbudristek, 2022: 14).

Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi, berbasis proyek, serta penguatan nilai-nilai karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Dalam konteks PAI, implementasi kurikulum ini diharapkan tidak hanya mengajarkan aspek kognitif agama, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari siswa (Sutrisno, 2023: 87). Hal ini tentu menuntut transformasi besar dalam pendekatan pembelajaran oleh guru PAI.

Menurut Suyadi (2022: 55), guru dituntut tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing yang mampu mengenali potensi dan kebutuhan belajar siswa secara individual. Ini sejalan dengan prinsip pembelajaran

berdiferensiasi yang menjadi kunci dalam Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, peran guru PAI menjadi sangat vital dalam mendesain dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Di sisi lain, literatur juga mencatat bahwa masih banyak guru yang belum memahami secara komprehensif konsep Kurikulum Merdeka, terutama dalam aspek pembelajaran berbasis proyek dan asesmen formatif (Hidayat, 2022: 101). Ketidaksiapan ini menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kurikulum tersebut secara optimal. Selain itu, perbedaan fasilitas dan sarana di berbagai sekolah juga memengaruhi keberhasilan implementasinya.

Pembelajaran PAI seharusnya dapat memanfaatkan pendekatan proyek untuk menanamkan nilai-nilai keislaman secara kontekstual. Misalnya, siswa diajak membuat proyek kebersihan masjid, kampanye anti-bullying dalam perspektif Islam, atau refleksi kisah Nabi dalam bentuk video dan presentasi. Sayangnya, pendekatan seperti ini masih jarang diterapkan secara luas (Mulyadi, 2023: 66).

Kurikulum Merdeka juga mendorong pembelajaran yang fleksibel dan tidak seragam antar sekolah. Dalam hal ini, tantangan muncul dari sisi perencanaan kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) yang memerlukan kreativitas dan pemahaman mendalam dari tim guru. Keterbatasan pelatihan dan pendampingan dari dinas pendidikan menyebabkan banyak satuan pendidikan yang sekadar menyalin KOSP dari sekolah lain tanpa menyesuaikan dengan konteks lokal mereka (Nurfadillah, 2022: 72).

Dengan berbagai latar belakang tersebut, maka penting dilakukan analisis literatur tentang implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI, khususnya untuk memetakan potensi, tantangan, serta strategi implementasi yang tepat dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah nasional, artikel kebijakan pendidikan, serta dokumen resmi dari Kemendikbudristek terkait Kurikulum Merdeka. Teknik analisis data dilakukan dengan membaca, memahami, dan mengevaluasi isi literatur yang relevan, kemudian disintesis untuk menemukan pola-pola implementasi serta tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran PAI di bawah kerangka Kurikulum Merdeka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Dasar Kurikulum Merdeka dalam Konteks PAI

Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons terhadap kebutuhan zaman yang menuntut pendidikan lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Dalam kerangka ini, peserta didik diposisikan sebagai subjek aktif pembelajaran, bukan sekadar objek penerima materi. Prinsip ini menjadi titik tolak transformasi pendekatan pedagogis, termasuk dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

Dalam konteks PAI, prinsip ini menekankan bahwa proses pembelajaran tidak boleh berhenti pada penguasaan pengetahuan keagamaan secara teoritis seperti hafalan ayat, hadis, atau konsep fikih tetapi harus diarahkan pada penghayatan nilai-nilai spiritual dan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata siswa. Sehingga, tujuan utama PAI dalam Kurikulum Merdeka bukan hanya mencetak siswa yang tahu tentang ajaran Islam, tetapi juga mampu menampilkan akhlak mulia dan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari (Suyadi, 2022: 55).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek,

2022: 20) menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka secara eksplisit mengintegrasikan Profil Pelajar Pancasila sebagai tujuan penguatan karakter dalam semua mata pelajaran, termasuk PAI. Profil ini mencakup enam dimensi utama: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam pembelajaran PAI, keenam dimensi ini dapat diinternalisasikan secara kontekstual melalui berbagai materi, seperti akhlak, sejarah nabi, ibadah sosial, dan muamalah.

Misalnya, dimensi "beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia" sangat dekat dengan tujuan inti PAI. Namun, Kurikulum Merdeka mendorong penguatan nilai ini tidak hanya lewat ceramah atau hafalan, melainkan dengan kegiatan nyata seperti praktik ibadah, proyek kebersihan masjid, refleksi diri, atau simulasi pengambilan keputusan berbasis etika Islam. Ini memperkuat proses internalisasi nilai, bukan sekadar kognisi semata.

Kurikulum Merdeka juga memberi ruang yang lebih luas bagi pembelajaran kontekstual dan lintas disiplin. Materi PAI dapat dikaitkan dengan isu-isu sosial, lingkungan, atau teknologi yang aktual, seperti etika penggunaan media sosial menurut Islam, kesadaran lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an, atau praktik zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memaknai ajaran agama secara lebih relevan dengan zaman.

Selain itu, kurikulum ini menekankan pentingnya *student agency* yakni kemampuan peserta didik untuk mengelola pembelajaran mereka sendiri. Dalam PAI, ini berarti guru harus membuka ruang dialog, memberi pilihan topik kajian, dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi sendiri sumber-sumber ajaran Islam secara mandiri dan reflektif. Ini merupakan bentuk pembelajaran yang sangat sejalan dengan semangat Islam yang mendorong *ijtihad*, berpikir kritis, dan keterlibatan aktif.

Transformasi peran guru juga menjadi bagian penting dalam prinsip dasar Kurikulum Merdeka. Guru PAI tidak lagi hanya bertindak sebagai penyampai materi (transmitter), melainkan sebagai fasilitator, inspirator, dan pendamping proses belajar siswa. Guru harus memiliki sensitivitas terhadap latar belakang, gaya belajar, serta kebutuhan psikologis dan spiritual peserta didik. Hal ini menuntut kompetensi pedagogik dan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan konvensional.

Kurikulum Merdeka menghapus pemaksaan capaian seragam di seluruh Indonesia dan menggantikannya dengan pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Hal ini membuka peluang besar bagi pengembangan muatan lokal PAI yang lebih kontekstual, seperti mengangkat kearifan lokal bernuansa Islam (misalnya tradisi tadarus di bulan Ramadan, gotong royong membersihkan masjid, atau kisah ulama daerah) ke dalam materi pembelajaran.

Secara keseluruhan, prinsip dasar Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI mengarahkan pendidikan agama menuju pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan aplikatif. Implementasi prinsip ini secara konsisten diharapkan tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membentuk generasi muda Muslim yang beriman, kritis, adaptif, dan siap hidup dalam masyarakat yang majemuk.

2. Pembelajaran Berdiferensiasi dan Tantangan di Lapangan

Salah satu prinsip kunci dalam Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi, yakni proses pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik yang berbeda-beda, baik dari segi kesiapan belajar, minat, maupun profil belajar mereka. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam mata pelajaran umum, tetapi juga sangat penting dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menyentuh dimensi afektif, spiritual, dan kultural peserta didik.

Dalam konteks PAI, pembelajaran berdiferensiasi berarti guru tidak boleh menerapkan metode atau materi yang seragam untuk semua siswa, melainkan harus peka terhadap keberagaman kemampuan pemahaman agama, tingkat kecakapan membaca Al-Qur'an, latar belakang keluarga, dan pengalaman spiritual siswa. Misalnya, siswa yang sudah terbiasa mengikuti kegiatan keagamaan di luar sekolah tentu memiliki kesiapan belajar agama yang berbeda dengan siswa yang tidak memiliki latar belakang serupa. Guru harus mampu menyusun strategi pembelajaran yang adaptif dengan memberikan tantangan, dukungan, dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing siswa (Tomlinson, 2017 dalam Muslich, 2022: 76).

Menurut Rahmawati (2022: 119), sebanyak 64% guru PAI yang diteliti belum mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif. Penyebab utamanya adalah keterbatasan pelatihan, minimnya literatur dan modul implementatif, serta kebingungan dalam menilai profil belajar siswa. Hal ini diperparah dengan beban administrasi yang tinggi serta minimnya supervisi dan dukungan dari pengawas PAI.

Tantangan utama lainnya adalah pemahaman konsep yang masih kabur. Banyak guru yang mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi hanyalah memvariasikan metode mengajar, padahal lebih dari itu, pendekatan ini menyentuh tiga komponen utama, yaitu: diferensiasi konten (apa yang diajarkan), proses (bagaimana siswa belajar), dan produk (hasil belajar yang diharapkan). Ketiganya harus disesuaikan dengan tiga aspek siswa: kesiapan belajar, minat, dan profil belajar (Tomlinson, 2014).

Contoh dalam pembelajaran PAI: ketika mengajarkan topik "Akhlak Terpuji", guru dapat menyediakan materi bacaan untuk siswa yang suka membaca, video pembelajaran untuk siswa yang lebih visual, dan aktivitas diskusi kelompok untuk siswa yang lebih interaktif. Di akhir pelajaran, siswa diberi kebebasan memilih cara menyampaikan pemahamannya, misalnya lewat cerpen islami, puisi dakwah, atau presentasi infografis. Pendekatan semacam ini tidak hanya menghargai keberagaman, tetapi juga mendorong keterlibatan emosional siswa terhadap materi agama yang diajarkan.

Namun, idealisme ini sulit terealisasi jika guru tidak diberikan pelatihan intensif dan berkelanjutan. Banyak guru PAI yang mengaku baru pertama kali mendengar istilah "pembelajaran berdiferensiasi" saat mengikuti sosialisasi Kurikulum Merdeka. Hal ini menandakan adanya kesenjangan besar antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Bahkan dalam beberapa kasus, guru diminta menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berdiferensiasi tanpa diberi panduan teknis yang memadai (Syahrul, 2023: 103).

Aspek lainnya adalah jumlah siswa dalam kelas yang terlalu besar sehingga menyulitkan guru untuk memetakan kebutuhan belajar individual. Di beberapa sekolah negeri, satu kelas bisa berisi lebih dari 35 siswa, dan guru harus mengajar beberapa rombongan belajar sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, idealisme pembelajaran berdiferensiasi sering kali dikalahkan oleh keterbatasan waktu dan tenaga.

Tantangan berikutnya adalah kurangnya kolaborasi antar guru mata pelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi akan lebih efektif jika dilaksanakan secara lintas mata pelajaran, termasuk dalam proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Sayangnya, guru PAI kerap merasa terisolasi karena dianggap mengajar "mata pelajaran nilai", bukan mata pelajaran proyek. Hal ini mempersempit ruang untuk berinovasi dan berkolaborasi.

Selain itu, dukungan kepala sekolah dan pengawas sangat menentukan. Jika pimpinan sekolah tidak memahami urgensi pembelajaran berdiferensiasi, maka inisiatif guru akan terhambat oleh kebijakan sekolah yang rigid dan administratif. Padahal, pemimpin pembelajaran yang progresif seharusnya memberi ruang eksperimen dan penguatan kapasitas guru di ruang kelas (Sahlberg, 2021).

Meskipun banyak tantangan, tidak sedikit pula praktik baik yang mulai muncul.

Beberapa madrasah dan sekolah Islam progresif telah mengembangkan modul PAI yang berorientasi diferensiasi dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Contohnya adalah penggunaan pendekatan *learning center* untuk materi ibadah, atau *role play* dan *drama islami* untuk materi sejarah nabi dan sahabat. Praktik-praktik semacam ini bisa menjadi inspirasi dan acuan bagi satuan pendidikan lain, asalkan didukung oleh kebijakan yang berpihak pada pengembangan profesionalisme guru.

Sebagai penutup, pembelajaran berdiferensiasi dalam PAI adalah peluang besar untuk menghadirkan pendidikan agama yang lebih manusiawi, kontekstual, dan bermakna. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan sinergi berbagai pihak: guru, kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Tanpa dukungan yang konkret, konsep ini hanya akan menjadi jargon yang sulit diimplementasikan secara nyata di ruang kelas.

3. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam PAI

Salah satu terobosan penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah adanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang bertujuan membentuk karakter siswa secara utuh dan kontekstual. P5 merupakan upaya sistematis dalam mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari siswa, dan Pendidikan Agama Islam (PAI) memainkan peran sentral dalam mewujudkan tujuan ini.

PAI memiliki muatan nilai yang sangat kaya dan langsung bersinggungan dengan dimensi-dimensi utama Profil Pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Materi-materi seperti akhlak, sirah nabawiyah (sejarah nabi dan sahabat), ibadah sosial, serta fiqh muamalah sangat potensial untuk dijadikan landasan dalam kegiatan proyek yang aplikatif dan menyentuh kehidupan nyata siswa.

Misalnya, dalam proyek bertema "Kampanye Toleransi Umat Beragama", siswa dapat diajak membuat poster, video kampanye, hingga menyelenggarakan dialog antaragama di sekolah. Kegiatan ini dapat dilandasi dengan kajian QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan pentingnya saling mengenal dan menghargai perbedaan. Dalam konteks ini, PAI tidak hanya diajarkan sebagai ilmu, tetapi juga dijalani sebagai nilai dan praktik kehidupan.

Proyek lain yang dapat dikembangkan dalam PAI adalah "Praktik Kepemimpinan Islami di Sekolah", di mana siswa belajar dari keteladanan Nabi Muhammad SAW dan khalifah rasyidin dalam memimpin. Siswa kemudian diberi peran sebagai ketua kelas, koordinator kebersihan, atau pemimpin upacara, sembari merefleksikan nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan amanah. Proyek ini menginternalisasikan dimensi *mandiri* dan *bergotong royong* dalam diri siswa.

Selain itu, "Literasi Zakat, Infaq, dan Sedekah" dapat dikembangkan sebagai proyek sosial di mana siswa melakukan penggalangan dana untuk membantu sesama, melakukan survei ekonomi sederhana terhadap lingkungan sekitar, dan melaporkan kegiatan dengan narasi nilai-nilai spiritual dan sosial. Proyek ini bisa melatih kepekaan sosial dan memperkuat dimensi *berakhlak mulia* serta *berpikir kritis*.

Menurut Yusuf (2023: 132), sekolah yang melaksanakan proyek P5 dengan pendekatan nilai keislaman mengalami peningkatan signifikan dalam keterlibatan siswa, antusiasme pembelajaran, serta pemahaman yang lebih dalam terhadap nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi PAI dalam P5 bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan penggerak utama dalam mewujudkan profil pelajar ideal.

Implementasi P5 dalam PAI juga mengembangkan kompetensi lintas abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, serta kreativitas. Melalui proyek-proyek bernuansa Islami, siswa tidak hanya belajar tentang Islam, tetapi juga belajar untuk hidup secara Islami dalam konteks zaman yang terus berubah.

Namun demikian, realisasi proyek P5 dalam PAI masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan waktu dalam kalender akademik, belum adanya modul proyek khusus berbasis PAI, serta kurangnya kolaborasi antara guru PAI dan guru mapel lainnya. Beberapa guru bahkan masih melihat proyek P5 sebagai "beban tambahan", bukan sebagai bagian dari strategi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna (Faridah, 2023: 98).

Solusi dari permasalahan ini adalah melalui pengembangan modul proyek P5 berbasis PAI yang kontekstual, praktis, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Kementerian Agama dan dinas pendidikan dapat menyediakan pelatihan dan template proyek yang bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Selain itu, kepala sekolah perlu menciptakan kultur kolaboratif antar guru untuk mengembangkan proyek-proyek lintas bidang studi yang memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus kebangsaan.

Dalam jangka panjang, P5 dalam PAI dapat menjadi media untuk membentuk generasi muda Muslim yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga matang secara spiritual, etis, dan sosial. Melalui proyek-proyek berbasis nilai Islami, pendidikan agama tidak lagi hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi hadir secara nyata dalam tindakan siswa sebagai warga negara dan umat beragama yang bertanggung jawab.

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI menghadapi tantangan besar terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, terutama di wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Salah satu ciri khas Kurikulum Merdeka adalah keterbukaan terhadap penggunaan teknologi dan bahan ajar digital, serta fleksibilitas dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP). Namun, hal ini tidak dapat diwujudkan secara optimal apabila fasilitas dasar seperti jaringan internet, perangkat teknologi, dan akses terhadap pelatihan belum tersedia secara merata di seluruh Indonesia.

Studi dari Kurniawan (2022: 91) menunjukkan bahwa 47% guru PAI di wilayah non-perkotaan belum memiliki akses rutin terhadap pelatihan Kurikulum Merdeka. Hal ini menimbulkan kesenjangan pemahaman dan kemampuan dalam merancang pembelajaran yang sejalan dengan prinsip kurikulum baru. Guru di daerah terpencil sering kali hanya mengandalkan buku paket cetak dan pengalaman mengajar sebelumnya tanpa inovasi pembaruan berbasis kurikulum.

Kendala lainnya adalah akses terhadap sumber belajar digital. Sementara sekolah di daerah urban sudah mulai menggunakan platform seperti *Google Classroom*, *Merdeka Mengajar*, atau *Learning Management System (LMS)* lainnya, banyak guru di daerah 3T bahkan belum familiar dengan perangkat tersebut. Akibatnya, pendekatan pembelajaran berbasis teknologi yang sangat disarankan dalam Kurikulum Merdeka tidak bisa diaplikasikan secara maksimal.

Kondisi fisik sekolah juga berpengaruh. Masih terdapat sekolah yang belum memiliki ruang kelas yang layak, perpustakaan, atau laboratorium komputer. Bahkan, dalam beberapa kasus, guru PAI harus mengajar di ruang serbaguna tanpa alat bantu pembelajaran yang memadai. Hal ini sangat membatasi kreativitas dan variasi metode yang dapat digunakan guru dalam mendukung pembelajaran berbasis proyek, berdiferensiasi, atau penanaman nilai karakter.

Selain masalah infrastruktur fisik dan digital, kesenjangan kompetensi antar guru juga menjadi hambatan serius. Tidak semua guru memiliki literasi digital dan pedagogik yang cukup untuk memahami konsep-konsep baru seperti asesmen formatif, pembelajaran berdiferensiasi, dan implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Tanpa adanya pendampingan intensif dan pelatihan berkelanjutan, Kurikulum Merdeka dikhawatirkan hanya menjadi dokumen formal yang tidak berdampak signifikan pada kualitas pembelajaran.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal, baik dalam bentuk subsidi internet, distribusi perangkat TIK, maupun pengiriman tenaga pelatih profesional. Kerja sama antara Kementerian Agama, Kemendikbudristek, dan pemerintah daerah juga sangat penting untuk menjamin bahwa semua guru PAI, terlepas dari lokasi tempat mengajar, memiliki akses yang adil terhadap peningkatan kompetensi dan fasilitas pembelajaran.

5. Perluasan Peran Guru PAI sebagai Fasilitator dan Pembina Karakter

Transformasi paradigma pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka turut mengubah peran guru secara fundamental, termasuk guru PAI. Jika sebelumnya guru lebih dikenal sebagai penyampai ilmu (*transfer of knowledge*), maka kini guru dituntut menjadi fasilitator, motivator, inspirator, dan pembina karakter siswa. Dalam konteks PAI, peran ini memiliki dimensi spiritual yang jauh lebih kompleks karena guru juga menjadi teladan dan pengarah kehidupan keagamaan siswa.

Sebagai fasilitator, guru PAI harus mampu mengarahkan pembelajaran agar berpusat pada siswa (*student-centered learning*). Ia dituntut untuk merancang kegiatan yang merangsang keaktifan, rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Pembelajaran tidak lagi hanya berupa ceramah atau hafalan, tetapi berbasis pada *problem-based learning* (PBL), *experiential learning*, dan *inquiry-based learning*. Misalnya, siswa tidak hanya diminta menghafal rukun iman, tetapi diajak berdiskusi tentang bagaimana iman berpengaruh dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

Model pembelajaran seperti PBL sangat sesuai dengan karakter pembelajaran PAI yang bernuansa nilai dan refleksi. Dalam PBL, guru dapat merancang studi kasus seperti "Bagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap saat melihat ketidakadilan di lingkungan sekitar?" Siswa akan diajak menganalisis, berdiskusi, dan membuat solusi berbasis nilai-nilai Islam. Ini akan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis sekaligus empati sosial.

Sebagai pembina karakter, guru PAI menjadi figur penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Peran ini tidak dapat dijalankan secara pasif; guru harus menjadi role model yang konsisten dalam sikap, perilaku, dan ucapan. Menurut Nurhadi (2023: 144), keterbukaan guru terhadap inovasi pembelajaran dan fleksibilitas peran sangat menentukan keberhasilan Kurikulum Merdeka. Guru yang mau belajar, beradaptasi, dan terbuka terhadap pendekatan baru akan lebih berhasil dalam membina karakter siswa yang sesuai dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila.

Namun demikian, perluasan peran ini membawa konsekuensi terhadap beban kerja guru PAI, baik secara fisik maupun mental. Banyak guru merasa kesulitan menyeimbangkan antara tuntutan administratif (penyusunan KOSP, modul ajar, asesmen diagnostik) dan peran ideal sebagai fasilitator dan pembina karakter. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistemik dari pihak sekolah, pemerintah, serta komunitas guru dalam bentuk pelatihan, forum diskusi, supervisi akademik yang konstruktif, serta pengakuan terhadap beban kerja tambahan.

Kolaborasi antarguru lintas mata pelajaran juga menjadi langkah strategis. Dengan menjalin kerja sama dalam pelaksanaan proyek P5 atau kegiatan ekstrakurikuler, guru PAI dapat memperluas pengaruhnya dalam membina karakter siswa secara menyeluruh. Misalnya, kolaborasi dengan guru seni budaya untuk membuat drama islami, atau dengan guru IPS dalam membahas peran zakat dalam ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, guru PAI tidak hanya menjadi pengajar pelajaran agama, tetapi menjadi agen perubahan dan penjaga nilai-nilai luhur yang membentuk kepribadian generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman.

KESIMPULAN

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI membawa semangat transformasi pendidikan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pembentukan karakter Islami. Konsep diferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan Profil Pelajar Pancasila memberikan peluang besar bagi guru PAI untuk merancang pembelajaran yang lebih hidup dan relevan.

Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa Kurikulum Merdeka benar-benar menjadi jalan baru dalam membudayakan nilai-nilai keislaman melalui PAI yang transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A. (2022). Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Studi Kasus di Sekolah Menengah. Jakarta: Pustaka Pendidikan Nusantara.
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kurniawan, A. (2022). Analisis Kesiapan Guru dalam Menghadapi Kurikulum Merdeka di Wilayah 3T. Yogyakarta: Deepublish.
- Mulyadi, R. (2023). Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Proyek. Bandung: Alfabeta.
- Muslich, M. (2022). Desain Pembelajaran PAI Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka. Surabaya: Cakrawala Ilmu.
- Nurfadillah, L. (2022). Evaluasi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) dalam Kurikulum Merdeka. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurhadi. (2023). Inovasi Peran Guru dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Jakarta: Pena Nusantara.
- Rahmawati, D. (2022). Kendala dan Solusi dalam Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi oleh Guru PAI. Semarang: Widya Mandiri.
- Sahlberg, P. (2021). Inilah Pendidikan yang Menginspirasi: Pelajaran dari Sistem Pendidikan Finlandia. Jakarta: Bentang Pustaka.
- Sutrisno, A. (2023). Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Merdeka: Teori dan Praktik. Malang: UIN Press.
- Suyadi. (2022). Revolusi Pembelajaran Abad 21: Dari Teacher Centered ke Student Centered. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faridah, S. (2023). Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Pendidikan Agama Islam. Bandung: Media Edukasi Islami.
- Syahrul, M. (2023). Problematika RPP Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka: Perspektif Guru PAI. Malang: UIN Press.
- Tomlinson, C. A. (2014). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. 2nd ed. Alexandria, VA: ASCD.
- Yusuf, R. (2023). Implementasi Proyek P5 Berbasis Nilai Keislaman di Sekolah Menengah. Bandung: Literasi Edukasi.